

# MEDIA JUSTITIA VOL.12

One Stop Legal Information

## PEMBUKAAN KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA: DIDUKUNG 25 PENGAWAS WILAYAH HINGGA KOMISI III DPR

“

*Kami bangga dan berbahagia bisa hadir dan menghadirkan KLB, di mana kita bisa menjalankan hak kita sesuai Pasal 28 UUD 1945, yakni kemerdekaan berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran, pendapat, dan aspirasi bagi organisasi yang kita cintai demi kemaslahatan orang banyak,”*



Nenden Esty Nurhayati,  
S.H., Sp.N., M.Si.  
Ketua Pelaksana  
KLB INI 2023

### EDUKASI HUKUM

**TANDA TANGAN SAYA  
DIPALSUKAN ADIK ANGKAT,  
APA SAYA BISA TUNTUT DIA?**



**LIPUTAN EKSKLUSIF**

**TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA, AMDD DAN  
PN JAKARTA TIMUR SIAP BERSINERGI**

SCAN ME



DOWNLOAD MAJALAH  
MEDIA JUSTITIA DIGITAL



# SEKAPUR SIRIH

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai *"One Stop Legal Information"* merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelumnya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui MediaJustitia.com dan juga *channel* Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui *audio visual* dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), *Ini Podcast*, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai *media partner* bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan *social media* seperti *website*, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (*Law Firm*), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan *social media*, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk *audio visual* sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi *One Stop Legal Information* bagi para pembacanya.

Salam,

**Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med**  
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

# Content

## PEMBUKAAN KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA: DIDUKUNG 25 PENGAWAS WILAYAH HINGGA KOMISI III DPR 03

### LIPUTAN DAN BERITA

Tandatangan Perjanjian Kerja Sama, AMDD dan PN Jakarta Timur Siap Bersinergi 05

KAHGAMA Teken MoU Dengan Kompas: Mari Berkontribusi Membangun Negeri 09

### WEBINAR

Kompetisi Dunia Karir Meningkatkan dan Ketat, KAHGAMA Berikan Strategi Hadapi Dunia Kerja 15

### TOKOH HUKUM

**Prof. Dr. Mr. Moeljatno**



21

ADAGIUM HUKUM 10

TANYA MEDJUS 22

### TANDA TANGAN SAYA

**DIPALSUKAN ADIK ANGKAT, APA SAYA BISA TUNTUT DIA?**



MEDJUS NANYA - TTH 24

### EDUKASI HUKUM

**BAHAYA BERKENDARA SAMBIL BERMAIN PONSEL** 18



### POST EVENT

#### BERITA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Justitia Training Center & PAHKI Berikan Pemahaman dan Penguasaan Keterampilan Pendampingan Hukum Kontrak Pengadaan Barang Barang/Jasa 07

Angkatan Ke-2, Justitia Training Center dan PAPHI Hadirkan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi 08

Lancar! Pelatihan dan Sertifikasi Analis Hukum Pertama Terlisensi BNSP Mengakomodir Kebutuhan Dengan Baik 12

Justitia Training Center Laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXV, Peserta: Berguna Untuk Praktisi Pajak Seperti Saya! 14

Mengadakan Pembelajaran Inisiatif Guna Tingkatkan Kinerja Karyawan, PT PLN (Persero) Percayakan Justitia Training Center untuk Selenggarakan IHT Sistem Hukum Pembuktian 19

PRODUCTION TEAM 25

CALL FOR ARTICLE BATCH XVIII 26

# PEMBUKAAN KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA: DIDUKUNG 25 PENGAWAS WILAYAH HINGGA KOMISI III DPR

**MediaJustitia.com:** Mengusung tema "Menjaga Organisasi yang Luhur & Berintegritas", Ikatan Notaris Indonesia (INI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 29-30 Oktober 2023 di Harris Hotel & Conventions Festival CityLink Bandung.

Nenden menyampaikan bahwa sejak pendaftaran dibuka 1 (satu) bulan yang lalu, terdapat 3.158 peserta yang mendaftar namun hanya 2.507 yang bisa melakukan verifikasi. Berdasarkan konfirmasi kedatangan sebelum pembukaan, jumlah peserta yang hadir dan bisa menggunakan hak suara adalah sekitar 2.240 peserta.

Berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga INI, KLB merupakan langkah pengembalian landasan organisasi INI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku dan mengingat. KLB INI 2023 juga merupakan wujud pelaksanaan dari Hasil Kongres XXIII Makassar 1 Mei 2019 dan Hasil Keputusan Kongres Luar Biasa INI pada 15 Juni 2022 di Kampar Riau silam.

“

*“Adalah suatu kebanggaan bagi kami bisa menyelenggarakan KLB yang merupakan amanah dari seluruh anggota INI di seluruh wilayah Indonesia. Kami bangga dan berbahagia bisa hadir dan menghadirkan KLB, di mana kita bisa menjalankan hak kita sesuai Pasal 28 UUD 1945, yakni kemerdekaan berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran, pendapat, dan aspirasi bagi organisasi yang kita cintai demi kemaslahatan orang banyak,”*

**Nenden Esty Nurhayati, S.H., Sp.N., M.Si.**  
Ketua Pelaksana KLB INI 2023

“

*“Tujuan KLB ini adalah untuk menjaga silaturahmi dan melakukan konsolidasi. Kami menginginkan agar wadah tunggal ini tetap satu, tetap dihargai dan dihormati dari apa yang sudah ada sebagai garda terdepan Kementerian Hukum dan HAM. Kita harus solid dan ingin bersama,”*

**Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., LL.M., Sp.N.**  
Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat INI

Adapun KLB INI 2023 diselenggarakan oleh 25 Pengurus Wilayah (Pengwil) INI, antara lain Pengwil Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,



**Nenden Esty Nurhayati, S.H., Sp.N., M.Si.**

**Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., LL.M., Sp.N.M.H.**

**Dr. Abdul Muis, S.H., M.H.**

**Dr. Hapendi Harahap**

**Habiburokhman, S.H., M.H.**

## SELAMAT DATANG PESERTA KLB INI 2023



Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Selaku Ketua Koordinator 25 Pengwil, Dr. Abdul Muis, S.H., M.H. menjelaskan bahwa KLB merupakan upaya terakhir setelah semua jalan untuk mencari penyelesaian mengalami kebuntuan.

“Pilihan ini harus ditempuh sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan (AD/ART), dengan semangat untuk tetap mencari jalan terbaik demi menyelamatkan Perkumpulan. Penunjukkan Kota Bandung sebagai tempat pelaksanaan juga bukannya tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk upaya mengembalikan kewibawaan forum Kongres sebelumnya yang menetapkan Jawa Barat sebagai Tuan Rumah, yang kemudian penetapan tersebut dicerderai,” tegasnya.

Abdul Muis mengajak para peserta KLB INI 2023 untuk mengembalikan dan menjalankan Perkumpulan sesuai AD/ART, serta menjaga budaya organisasi yang luhur dan bermartabat.

Pembukaan KLB INI 2023 turut dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Dr. Hapendi Harahap, yang berkehendak untuk menggandeng INI dengan kuat, sehingga berharap KLB INI 2023 dapat menciptakan organisasi yang kuat dan bermartabat.

Membersamai pembukaan kegiatan KLB INI 2023, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., berharap KLB bisa diselenggarakan dengan demokratis, tertib, dan damai, serta menghasilkan suatu hasil yang tepat sasaran, mengingat pelaksanaannya sudah didasarkan pada AD/ART.

“

*“Kami ingin acara ini sukses, sampai pengesahan nanti InsyaAllah kami support secara full. Hampir setiap hari kami mendapat atensi dari seluruh Indonesia yang mendukung KLB ini. INI organisasi besar yang harus diselamatkan, jangan sampai terpecah belah, apabila organisasinya berantakan, khawatirnya kinerja dalam melayani masyarakat akan berantakan juga. Maka siapapun yang terpilih akan kita bantu urus pengesahannya dan harus segera merangkul dan melayani rekan-rekan notaris se-Indonesia,” jelas Habiburokhman dalam wawancara bersama tim Media.*

Sebagaimana para peserta disambut dengan Tari Nusantara, pembukaan kegiatan KLB INI 2023 juga mengedepankan budaya Indonesia, yakni dengan pembunyian angklung secara simbolis oleh 25 Pengwil serta para peserta.

Pembukaan kegiatan diikuti dengan kegiatan memainkan angklung bersama serta pemaparan materi “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa/PMPJ” oleh Martinef, S.H., M.Si (Majelis Pengawas Notaris).

Diketahui, KLB INI 2023 terbagi atas Sidang Pleno I, Sidang Komisi, Sidang Pleno II, Sidang Pleno III dan ditutup dengan Pemilihan serta Pelantikan Ketua Umum dan Anggota DKP Periode 2023-2026.

# TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA, AMDD DAN PN JAKARTA TIMUR SIAP BERSINERGI

JUMAT, 20 OKTOBER 2023

**MediaJustitia.com:** Tindak lanjut upaya membumikan mediasi, Asosiasi Mediator Duta Damai (AMDD) tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus (PN Jaktim) terkait pelayanan mediasi pro bono.

Penandatanganan yang dilakukan pada Jumat (20/10/23) di Ruang Sidang Utama PN Jaktim tersebut disambut baik oleh Hongkun Otoh, S.H., M.H. (Ketua PN Jaktim).



Pemotongan tumpeng secara simbolis dan peresmian ruang mediasi



“Setiap rapat bulanan saya sudah ditodong kapan kerja sama ini akan terlaksana. Akhirnya hari ini tiba saat yang ditunggu-tunggu. Kami bersyukur teman-teman AMDD datang ke kami untuk menandatangani kerja sama di bidang pelayanan mediasi secara pro bono,”

**Hongkun Otoh, S.H., M.H.**  
Ketua PN Jaktim

“Akhirnya apa yang kita cita-citakan dan perjuangan bisa terlaksana. Kami sangat berterima kasih dan bangga karena diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh PN Jaktim. Kami berkomitmen untuk jaga integritas dan nama baik PN Jaktim dan juga AMDD,”

**Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.**  
Ketua AMDD



Hongkun berpesan kepada para mediator non hakim AMDD agar memahami tata cara mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi (Perma 1/2016) dan segera menyesuaikan diri agar kerja sama dapat terlaksana dengan baik.

Ungkapan syukur turut disampaikan oleh Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. (Ketua AMDD) pada sambutannya.

Risma turut menyampaikan bahwasanya mediator AMDD yang berjumlah lebih dari 58 orang tersebut memiliki latar belakang (spesialis) yang beragam sehingga dapat menangani berbagai jenis kasus.



Dalam wawancara bersama tim Media, Hongkun Otoh menuturkan perkara yang sering ditangani oleh PN Jaktim antara lain PMH, wanprestasi dan didominasi oleh perkara perceraian, sehingga diharapkan dapat mendapat perhatian khusus oleh AMDD.

“Saya berharap kehadiran teman-teman AMDD bisa membantu mengurangi beban perkara yang ditangani hakim dengan memberikan pelayanan terbaik dalam mendamaikan para pihak. Penyelesaian perkara tidak usah panjang-panjang, kalau bisa selesai lebih cepat maka lebih baik, sesuai dengan asas pengadilan cepat, sederhana, dan berbiaya rendah,” tegasnya Hongkun.



Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian ruang mediasi, ruang kaukus, dan ruang mediator non hakim di PN Jaktim.

Diketahui, rencana kerja sama tersebut telah digagas sejak lama namun baru dapat direalisasikan pada 20 Oktober 2023. Kerja sama akan berlaku efektif pada tanggal 1 November 2023.

Risma berpesan kepada para mediator AMDD untuk membuktikan komitmen kuat dalam mengupayakan pbumihian mediasi melalui penerapan Perma 1/2016 dengan baik.

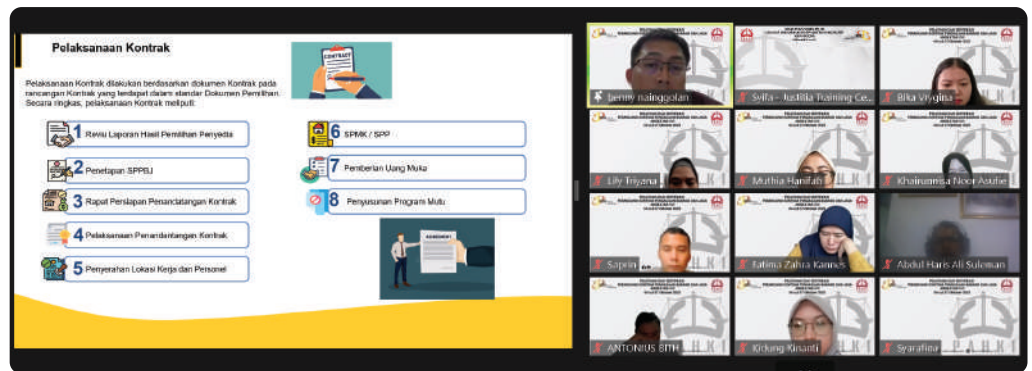
“Ini merupakan panggilan hati bagi kami untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dan pengadilan, maka harus dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, agar komitmen dan integritas tetap terjaga” ujar Risma.

9 Oktober 2023

## Justitia Training Center & PAHKI Berikan Pemahaman dan Penguasaan Keterampilan Pendampingan Hukum Kontrak Pengadaan Barang Barang/Jasa

**MediaJustitia.com:** Justitia Training Center dan Per-kumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI) telah menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan XVI pada 04 s.d. 07 Oktober 2023.

Adapun kegiatan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru yang sudah berlaku mulai tahun 2018 dan mengatur mengenai tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), dan pejabat lainnya



Terselenggara secara daring, Justitia dan PAHKI menghadirkan narasumber yang kompeten dari kalangan praktisi dan akademisi, antara lain Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt; Edi Usman, S.T., M.T., AU (MP & TBG)., CCMS.; Benny RM Nainggolan, S.E., M.Si., CCMs.; Rista Natalia Sinaga, S.E., M.E.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. Adapun garis besar materi yang diberikan dalam pelatihan ini, antara lain:

- Menyusun rancangan kontrak pengadaan barang/jasa
- Melakukan negosiasi
- Melakukan finalisasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa
- Membentuk tim pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa
- Menyusun rencana pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
- Menyelesaikan permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa
- Melakukan penerimaan hasil pengadaan barang/jasa
- Mengelola kinerja & resiko

Kompetensi para peserta pelatihan kemudian diuji melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Sertifikasi Profesi Nasional (BNSP).

Harapannya, para peserta dapat berperan secara aktif dalam memberikan masukan-masukan, merancang kontrak pengadaan barang dan jasa, serta menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

“

*“Pada pelatihan ini akan dijelaskan mengenai hal-hal terbaru dan perubahan-perubahan apa saja terkait pengadaan barang/jasa. Pelatihan juga akan berfokus pada posisi dan peran perancang dan ahli manajemen kontrak pengadaan dalam memahami dan menguasai keterampilan pendampingan hukum dalam hal penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menghindari kesalahan-kesalahan teknis maupun substansi yang sering terjadi,”*

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H.,  
 CCD., CMLC., CTLC., C.Med.  
 Presiden Direktur Justitia Training Center

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran  
 silakan menghubungi

Syifa  
 0811 1021 126



## Angkatan Ke-2, Justitia Training Center dan PAPHI Hadirkan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi

**MediaJustitia.com:** Justitia Training Center bersama Perkumpulan Ahli Profesional Hukum Indonesia (PAPHI) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi Angkatan ke-2.

Kegiatan terselenggara secara *hybrid* pada 11-14 Oktober 2023 dengan pelatihan dilaksanakan secara daring dan uji sertifikasi secara luring.

Adapun asuransi merupakan bentuk perjanjian yang dilandaskan pada kepercayaan antara tertanggung dan penanggung, di mana keduanya saling percaya.

Dalam wawancara yang dilangsungkan bersama tim Media Justitia, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med (Presiden Direktur Justitia Training Center) menuturkan bahwa bisnis asuransi saat ini tengah berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap risiko yang bisa terjadi.



*“Fraud sebagai tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain, dapat dilakukan oleh pihak penanggung, tertanggung, ataupun pihak lain yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Untuk itu penting bagi kita mengantisipasi terjadinya fraud dengan memahami aspek-aspek dalam asuransi, serta risiko yang mungkin muncul dengan pemahaman bahasa hukum dalam penyelesaian sengketa di dunia asuransi,” ujarnya.*

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med.  
Presiden Direktur Justitia Training Center

- Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt. (Praktisi Hukum, Dosen Universitas YARSI, Ahli Hukum Kontrak)
- Dr. Kornelis Simanjuntak, S.H., M.H. (Lektor Kepala dalam Hukum Asuransi FH UI, Mediator & Aribet BANI dan LAPS-SJK, Pengawas Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia)
- Tagor Ricardo Sibarani, S.H., M.H. (Vice President – Head of Legal & Corporate Secretary PT Avrist Assurance)
- Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M (Advokat, Kurator, Partner & Co-Founder Siahaan Gea Attorneys at Law)
- Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center)

Pada penghujung kegiatan, para peserta diuji sertifikasinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebelum dinyatakan kompeten.

Sharad Nanwani (PT Lestari Cipta Hokindo Insurance Broker), salah seorang peserta yang mengikuti kegiatan karena merasa topik relevan dengan pekerjaannya, menuturkan kesannya terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Aspek hukum asuransi sangat jarang dibicarakan, jarang dibahas di seminar, padahal sangat penting jikalau terjadi wanprestasi, maka dari itu saya mengikuti kegiatan ini. Saya memilih Justitia karena reputasi pembicaraannya sangat baik, kegiatan juga terlaksana dengan baik, *on time*, dan kami diberi kesempatan untuk *two way communication*,” pungkasnya.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para peserta, Justitia dan PAPHI menghadirkan beragam narasumber yang memiliki kompetensi di bidang asuransi, antara lain:

- Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. (Dosen FH UNAIR, Tim Reviewer Lembaga Penelitian UNAIR, Redaksi Jurnal Ilmiah Yuridika Fakultas Hukum UNAIR, Guru Besar Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Ketua Umum DPP PAHKI, Rektor UNJANI, Guru Besar Hukum Internasional UI, Pakar Hukum Internasional)

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran silakan menghubungi

Hadi  
**0811 9942 112**

Tiara  
**0811 1021 526**

# KAHGAMA TEKEN MOU DENGAN KOMPAS: MARI BERKONTRIBUSI MEMBANGUN NEGERI!

RABU, 18 OKTOBER 2023



Foto bersama pengurus KAHGAMA dan Kompas pada acara penandatanganan MoU (foto: Media Justitia)

**MediaJustitia.com:** Rabu (18/10/2023), bertempat di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Keluarga Alumni Fakultas Hukum Gadjah Mada (KAHGAMA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kompas. Kompas membuka ruang bagi KAHGAMA untuk berkontribusi membangun negeri.

Sejalan dengan itu, Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda S.H., M.Hum., LL.M. (Ketua Umum KAHGAMA) menyampaikan kerja sama KAHGAMA dengan Kompas dapat berdampak baik bagi negara dan bangsa.

*“Saya senang sekali rasanya menjadi tamu Kompas dan merasa terhormat membawa teman-teman KAHGAMA, sebagai harian terbesar dan independent kerja sama dengan Kompas dapat membawa dampak baik bagi bangsa dan negara,”* katanya.

**Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda S.H., M.Hum., LL.M.**  
Ketua Umum KAHGAMA

Masuk pada acara inti penandatanganan MoU antara KAHGAMA dan Kompas dilakukan oleh Ketua Umum KAHGAMA Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda S.H., M.Hum., LL.M. dan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Lebih lanjut, Budiman Tanuredjo turut menyatakan adanya keinginan Kompas untuk mengembalikan era-era pemikiran kritis, hal ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya kerja sama dengan KAHGAMA.



*“Sayang apabila pemikiran dan gagasan dari teman-teman KAHGAMA hanya disimpan dalam hati, lebih baik di publish,”*

**Budiman Tanuredjo**

Melalui wawancara terpisah yang dilakukan oleh tim Media Justitia, Budiman Tanuredjo menyampaikan bahwa Kompas siap mensosialisasikan ide dan gagasan dari KAHGAMA.

*“Agar pemikiran dari mazhab UGM dapat lebih dikenal sebab hidup memerlukan ide dan gagasan, ide itu adanya di kampus sehingga penelitian yang ada di kampus hanya akan menjadi penelitian ketika tidak disharekan ke publik, Kompas membuka ruang mempopulerkan dan mensosialisasikan gagasan tersebut,”*



“Kerja sama hari ini sebagai undangan kepada teman-teman KAHGAMA untuk berkontribusi membuat negeri ini menjadi lebih baik,” kata Budiman Tanuredjo (Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas) dalam sambutan pembukaan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) KAHGAMA dan Kompas.”



Prof. Dr. Paripurna menyampaikan harapannya dengan Kompas sebagai lembaga teruji dan sudah terkenal diharapkan dapat membawa nama KAHGAMA lebih baik dan dikenal masyarakat luas.

“Ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin kerja sama ini (kompas), sebagai lembaga teruji terkenal diharapkan (kompas) dapat membawa KAHGAMA semakin dikenal masyarakat luas di kedepannya,”

**Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda**  
S.H., M.Hum., LL.M.  
Ketua Umum KAHGAMA



# Adagium Hukum

## UT SEMENTEM FACERIS ITA METES

*As you sow, so reap*

Siapa yang menanam sesuatu dia yang akan memetik hasilnya

## CUJUS EST DOMINIUM, EJUS EST PERICULUM

*The risk ownership is borne by the owner*

Risiko atas suatu kepemilikan ditanggung oleh pemilik

## PRESUMPTIO IURES DE IURE

*Everyone is considered to know the law. Also known as the principle of legal fiction*

Semua orang dianggap tahu hukum. Dikenal juga sebagai asas fiksi hukum.

## VAN RECHTSWEGE NIETING; NULL AND VOID

*A judicial process that is carried out not according to law is null and void*

Suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum

# UPCOMING EVENT NOVEMBER 2023

## Pelatihan dan Sertifikasi

### Perancang Kontrak Angkatan XXXVI

(Certified Procurement Contract Drafter)

📅 1 - 4 November 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



## Pelatihan dan Sertifikasi

### Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XVII

(Certified Insurance Legal Consultant)

📅 8 - 11 November 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



## Pelatihan dan Sertifikasi

### Konsultan dan Ahli Kepabeanaan Angkatan VIII

(Certified Tax Legal Consultant)

📅 15 - 19 November 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



## Pelatihan dan Sertifikasi

### Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Angkatan XXVIII

(Certified Mediator)

📅 22 - 26 November 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



## Pelatihan dan Sertifikasi

### Mediator Angkatan XLIII

(Certified Mediator)

📅 29 November - 3 Desember 2023

🕒 08.30 s.d. 16.30 WIB



# PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

23 Oktober 2023

## Lancar! Pelatihan dan Sertifikasi Analisis Hukum Pertama Terlisensi BNSP Mengakomodir Kebutuhan Dengan Baik

**MediaJustitia.com:** Persiapkan analisis hukum pemerhati isu hukum aktual, Justitia Training Center dan Perkumpulan Ahli Profesional Hukum Indonesia (PAPHI) hadirkan Pelatihan dan Sertifikasi Analisis Hukum.

Diketahui, kegiatan tersebut merupakan Pelatihan dan Sertifikasi pertama pada skema Analisis Hukum yang memperoleh lisensi negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kegiatan yang terlaksana pada 18-22 Oktober 2023 tersebut diikuti oleh 33 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga negara non kementerian dan firma hukum.

Sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beraneka ragam aturan, maka perlu dilakukan penyesuaian yang juga meliputi kebijakan politik legislasi nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hyper regulasi juga akan berdampak pada disharmonisasi dan kurang maksimalnya penyelesaian masalah yang ada. Untuk itu, Justitia dan PAPHI menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi pada pelatihan yang kegiatan terlaksana secara daring tersebut. Narasumber yang dimaksud antara lain:

- **Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.** (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Guru Besar Fakultas Hukum UPNVJ)
- **Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.** (Ketua Prodi Doktor FH UNBOR, Ketua Umum DPN PERKHAPPI, Tim Asistensi Hukum Nasional)
- **Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.** (Ketua Umum DPP PAHKI, Rektor UNJANI, Guru Besar Hukum Internasional UI, Pakar Hukum Internasional)
- **Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MM.Mgt.** (Praktisi Hukum, Dosen Universitas YARSI, Ahli Hukum Kontrak)
- **Pungky Hendrawijaya, S.H., M.Leg.Stud., Ph.D.** (Legal Advisor, Dosen Senior UPNVJ)

“

*Saya sangat mengapresiasi terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Analisis Hukum ini karena peminatnya begitu banyak. Bahkan ketika sudah fullseat, masih ada beberapa peserta yang hendak mendaftarkan rekan-rekannya,”*

Dhea Yulia Maharani, S.H., CCD., C.Med  
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi  
Justitia Training Center



Pengantar Peran dan Fungsi Analisis Hukum Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.

Dhea menuturkan bahwa para peserta yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan pada angkatan pertama akan diarahkan pendaftarannya pada angkatan selanjutnya.

“Saya berharap Bapak/Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat direkomendasikan kompeten pada uji sertifikasi di hari terakhir nanti,” imbuh Dhea.

- **Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.** (Dosen Universitas Tarumanagara, Advokat, Kurator, Saksi Ahli Berbagai Pengadilan, Pengarang Buku dan Perancang/Narasumber pada pembuatan berbagai Undang-undang)
- **Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.** (Analisis Hukum Ahli Madya Kepala bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN Kemenkumham)
- **Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.** (Koorbid Perekonomian Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham)
- **Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.** (Presiden Direktur Justitia Training Center)

23 Oktober 2023

Pada penghujung kegiatan, para peserta akan diuji kompetensinya secara luring melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia (LSP HI) yang telah terlisensi oleh BNSP.

Meskipun uji sertifikasi Analis Hukum diselenggarakan secara tatap muka, skema-skema Pelatihan dan Sertifikasi di Justitia Training Center lainnya hampir semua sudah bisa dilaksanakan secara daring (Asesmen Jarak Jauh/AJJ).

Salah seorang peserta kegiatan, Ichsan Syaidiqi, S.H., M.H. (Kelompok Kerja Analis Hukum Komisi Kejaksaan Republik Indonesia) menuturkan bahwa ia mengikuti kegiatan karena adanya kebutuhan yang bertemu dengan kesempatan oleh Justitia Training Center.

Terkait uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP HI, Ichsan juga menuturkan kesan yang baik karena adanya alur instruksi yang jelas.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan yang pertama kali saya ikuti. Meskipun secara daring, saya dapat impresi yang bagus karena pemilihan narasumber dan pengajar sangat baik, para pengajar sangat mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari peserta training,” ujarnya dalam wawancara bersama tim Media Justitia.

“Teman-teman panitia juga sangat membantu dengan fasilitas yang memadai. Asesor penguji dari LS mengakomodir kebutuhan kami dengan baik, kami diarahkan untuk mengikuti uji sertifikasi sesuai kualifikasi masing-masing.

Ichsan Syaidiqi, S.H., M.H.  
Peserta Kegiatan



## Justitia Training Center Laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXV, Peserta: Berguna Untuk Praktisi Pajak Seperti Saya!



**MediaJustitia.com:** Berguna bagi praktisi perpajakan, Justitia Training Center Kembali Laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXV.

Kegiatan yang diselenggarakan secara *online* melalui zoom meeting berlangsung selama 5 (lima) hari sejak 18 s/d 22 Oktober 2023. Adapun peserta dalam kegiatan ini berasal dari berbagai instansi yang berasal dari berbagai daerah.

Dhea Yulia Maharani, S.H., CCD., C.Med. (Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center) mewakili Presiden Direktur Justitia Training Center, membuka kegiatan ini dengan menjelaskan keuntungan kegiatan ini para peserta akan memperoleh izin kuasa hukum.

“

*Setelah kegiatan ini selesai bapak ibu juga dapat mendaftarkan diri untuk menerima izin kuasa hukum perpajakan yang terdaftar di pengadilan pajak, tentu saja dengan nanti melengkapi beberapa macam berkas yang diperlukan,” jelasnya.*

Dhea Yulia Maharani, S.H., CCD., C.Med  
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center

Pelatihan ini tentu menghadirkan narasumber yang luar biasa ahli di bidangnya, antara lain Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.; Ikhwan Ashadi, S.E., S.H., M.H., M.M., M.Ak., Ak., CA., ACPA., CPA., BKP.; Muhammad Mansur, BKP., CPA.; Januardo S.P. Sihombing, S.H., M.H., M.A., BKP.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC. C.Med.

Pada penghujung kegiatan, para peserta diuji kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebelum dinyatakan kompeten.

Salah satu peserta, Silpa Latipah Hariani, S.E., M.Ak., CCA. (PT Hai Feng) menyampaikan alasannya memilih Justitia Training Center sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi.

“Justitia training center, menawarkan pelatihan yang diperlukan dan berguna bagi saya di bidang perpajakan. Selain itu, Justitia memiliki kredibilitas, kerjasama dengan lembaga Pendidikan, terlisensi dengan MA, dan berguna bagi praktisi seperti saya,” jelas Silpia dalam wawancara yang dilakukan oleh tim Media Justitia pada Minggu, (22/10/2023).

Senada dengan itu Dendy Ari Galuh Pasiwi, S.H., M.H (Flamboy Law Office) yang juga peserta Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXV menyampaikan latar belakang mengikuti pelatihan.

“Tentunya latar belakang untuk memiliki kemampuan yang lebih *advance* di bidang perpajakan sera menunjang profesinya sebagai advokat dan penegak hukum. Justitia memberikan kemudahan bagi peserta disela-sela kesibukannya menimba ilmu (bidang perpajakan) lebih *advance*,” ucap Dendy.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran silakan menghubungi:

Thio  
0857 1188 9511

Putri  
0811 1021 524

# KOMPETISI DUNIA KARIR MENINGKAT DAN KETAT, KAHGAMA BERIKAN STRATEGI HADAPI DUNIA KERJA

## MediaJustitia.com:

Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) mengajak kalangan masyarakat untuk bertekad mempersiapkan diri dan menentukan karir sesuai bakat, talenta dan kompetensinya. KAHGAMA mewadahnya dengan menyelenggarakan webinar bertajuk "Peluang dan Tantangan Menghadapi Dunia Kerja".

Kegiatan disambut dengan antusias oleh para peserta mengingat kompetisi dalam dunia karir profesional semakin meningkat dan ketat, terlebih dengan bonus demografi yang terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan sebuah upaya persiapan untuk menghadapinya.

“

***"Perubahan teknologi, perubahan iklim, dan perubahan sosial telah mengubah lanskap pekerjaan secara signifikan. Sebagai hasilnya, kita semua perlu terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar tetap relevan dalam dunia kerja yang dinamis ini,"***

**Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H.**  
Ketua Panitia Pelaksana dan Koordinator bid. Humas KAHGAMA



Andrian menyatakan bahwa webinar hadir sebagai bentuk komitmen KAHGAMA dalam memberikan kontribusi nyata bagi para mahasiswa, alumni, dan seluruh generasi muda Indonesia calon pemimpin masa depan agar mampu menghadapi tantangan dan memperbesar peluang dalam menghadapi dunia kerja untuk masa depan yang lebih baik.

Hal serupa disampaikan oleh Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

Menurutnya, alih-alih cemas, seyogyanya kita memiliki cara berpikir kreatif, inovatif, dan berkemauan untuk berkembang.

“***"Saya selaku dekan mengucapkan terima kasih kepada KAHGAMA yang telah menangkap kebutuhan masyarakat dan menyelenggarakan webinar ini. Selamat mengikuti webinar untuk mengambil manfaat dan berpikir kreatif. Ubah tantangan menjadi peluang!"*** tegas Dahliana.

Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M. (Ketua Umum KAHGAMA) turut menegaskan mengenai bonus demografi yang tengah dihadapi oleh Indonesia harus akomodir dengan baik.

“

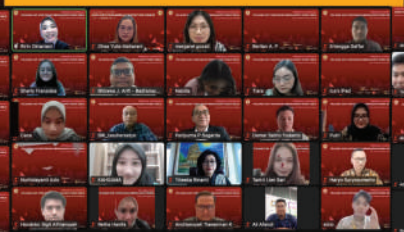
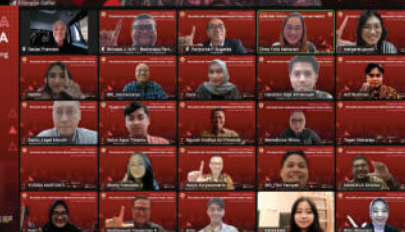
***"Saat ini jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif, di mana penduduk laki-laki berusia produktif berjumlah 96 juta penduduk dan wanita 94 penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi bonus demografi yang diibaratkan pisau bermata dua, apabila bisa dimanfaatkan dengan baik maka akan memberikan manfaat perekonomian bagi Indonesia,"*** ujar Prof. Paripurna.

Menurutnya, saat ini persaingan kerja semakin kolektif karena perkembangan IT telah mengubah banyak hal. Meskipun demikian, peluang kerja juga berkembang pesat seiring dengan meningkatnya tantangan di dunia kerja.

Webinar tersele- nggara secara daring pada Kamis (12/10/23) dengan diikuti oleh hampir 300 orang yang tergabung melalui Zoom Meeting.

Sesi pemaparan materi dan diskusi peserta dipandu oleh Bhirawa Jayasidayatra Arifi, S.H., LL.M. (Wakil Sekretaris Jenderal KAHGAMA) selaku moderator.





Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini antara lain Prof. Anwar Sanusi, Ph.D (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI), Issuher SATYO (Division Head Human Capital Development PT. Bank BRI (Persero) Tbk.), Erlangga D.A. Gaffar (VP ICCA, In House Counsel PT Kideco Jaya Agung), HaryoUtomoS (Managing Director PT Headhunter Indonesia).

Kegiatan turut dihadiri oleh H. Ganjar Pranowo, S.H., MIP (Ketua Umum PP KAGAMA). Dalam *keynote speech*-nya, Ganjar menuturkan bahwa harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan pesat yang terjadi.

Ganjar berharap melalui webinar ini, *transfer of knowledge* akan terjadi dan muncul rekomendasi dari segi *knowledge* dan *skill* guna menjawab keresahan masyarakat, khususnya mahasiswa dan para pencari kerja.

KAGAMA juga memfasilitasi para pencari kerja dengan menyediakan sarana penerimaan CV ke dalam *dropbox* untuk dihubungkan dan digunakan oleh para penyedia kerja, khususnya alumni UGM.

**Pemaparan Narasumber**

Terlebih dahulu, para peserta disuguhkan *point of view* dari instansi pemerintah oleh Peraih Satya Lencana dari Presiden pada 2004 dan 2014 Prof. Anwar Sanusi, Ph.D (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI) dengan materi Sinkronisasi Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Kompetensi Pencari Kerja.

Menghadapi tantangan yang menghadang kedepannya, Anwar juga menyampaikan sarannya kepada para tenaga kerja muda untuk memiliki motivasi karena kompetitifnya dunia kerja, peningkatan peluang dengan terus belajar, dan memanfaatkan jaringan dengan orang sekitar.

Selanjutnya, Issuher SATYO (Division Head Human Capital Development PT. Bank BRI (Persero) Tbk.) memberikan gambaran mengenai Strategi Menghadapi Dunia Kerja di BUMN. Menurutnya, kita tidak akan berhenti belajar. Disamping lingkungan yang selalu berkembang, maka kita perlu berkembang beriringan juga.

Para peserta kemudian mendapat pemahaman mengenai Strategi Menghadapi Dunia Kerja di *Private Sector* oleh Erlangga D.A. Gaffar (VP ICCA, In House Counsel PT Kideco Jaya Agung).

“Terima kasih kawan-kawan yang sudah menjalankan kegiatan ini, karena hal ini penting untuk mendapat perhatian kita semua di tengah bonus demografi ini. Sekolah dan perguruan tinggi punya PR yang tidak ringan. Rasa-rasanya kurikulum harus disesuaikan, sistem metode mengajar harus lebih modern, dan praktiknya juga harus lebih cepat, harus sat-set, agar kita tidak merasa tertinggal,” ujarnya.

“Dari sisi sumber daya manusia, proporsi penduduk usia muda di Indonesia jauh lebih tinggi dari rata-rata negara ASEAN. Hal ini dimaknai sebagai bonus demografi. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik maka dapat merubah wajah perekonomian Indonesia,” jelasnya.

“Penting untuk kita mempersiapkan diri semenjak bangku kuliah untuk terus mengembangkan kompetensi kita seiring dengan perkembangan teknologi. Apa yang dibutuhkan oleh kita semua? Ada 3 hal, yakni fokus ke human skill, be prepared for a lifetime of learning dan plan for multiple and many transitions,” ujar Issuher SATYO.

“Highlight tips and trick fresh graduate, kita bisa meningkatkan value dengan memanfaatkan magang sebelum lulus, memanfaatkan jaringan alumni, meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai hukum. Penting diingat untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita. Tapi, be ready to fail agar kita selalu menyediakan back up plan. Sebagai manusia yang adaptif, kita harus bisa mengantisipasi dengan banyak plan agar bisa survive,” jelasnya.

Pemaparan Erlangga menjadi materi komplementer dengan pemateri-pemateri sebelumnya. Terlebih Erlangga menekankan bahwa lulusan-lulusan perguruan tinggi ter-nama sebetulnya bukan *“golden ticket”* dengan banyak *privilege*. Melainkan kembali lagi kepada faktor penentu berupa *skill* yang akan sangat berdampak pada profesi karir.

Pemaparan materi ditutup oleh Haryo Utomo S (Managing Director PT Headhunter Indonesia) dengan materi mengenai Teknik Mengubah Mindset Sebelum Masuk ke Dunia Kerja.

Haryo memberikan paparan dengan perspektif yang berbeda dengan narasumber-narasumber lainnya. Ia menekankan kepada para mahasiswa untuk memiliki fokus utama dalam jangka *long term* dengan membangun pondasi karir jangka panjang dan berkelanjutan. Adapun kriteria penting yang dibutuhkan adalah *knowledge, skills, experience* dan *character*.

“

*Jangan berpikir untuk diri sendiri, melainkan pikirkan bagaimana kita dapat menebar manfaat bagi orang lain, karena akan sangat egois apabila ilmu yang didapatkan hanya digunakan untuk diri sendiri. Bagaimana cara kita menebar manfaat? Learn something, unlearn everything, and re-learn new things!”*  
pungkas Haryo.

Sesi diskusi berjalan dengan interaktif. Para peserta dengan antusias aktif melontarkan pertanyaan kepada para narasumber.



Mengucapkan

# Selamat Hari SUMPAAH PEMUDA

28 Oktober



# BAHAYA BERKENDARA Sambil BERMAIN PONSEL

**MediaJustitia.com:** Halo sobat justitia! Tidak jarang kita melihat pengendara yang sering memainkan ponselnya sambil menyetir. Hal tersebut jelas berbahaya dan kamu bisa dikenakan sanksi loh!

Di Edukasi Hukum kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan ponsel saat berkendara. Yuk simak selengkapnya!



sumber foto: tribunnews.com

Pada umumnya, masyarakat sudah menganggap ponsel sebagai kebutuhan pokok dalam berkomunikasi bahkan menjadi sumber dari berbagai informasi. Karena semakin tingginya popularitas ponsel, hal ini menjadikan manusia semakin mudah dalam menggunakan ponsel dimanapun dan kapanpun.

Namun sayangnya, masih banyak orang yang menggunakan ponsel di waktu yang salah, seperti saat berkendara. Menggunakan ponsel ketika berkendara merupakan salah satu aturan sekaligus larangan yang harus dipatuhi semua pengendara karena hal ini beresiko mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membuat pengendara ataupun orang lain mengalami cedera ringan maupun berat bahkan mengalami kematian.

Dasar larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengendara terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" yaitu setiap pengemudi harus fokus dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan agar tidak menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan yang lain.

Adapun cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan ponsel ketika berkendara loh sobat justitia!

- Pasang *silent mode* pada ponsel ketika berkendara.
- Jauhkan ponsel dari pandangan dan jangkauan pengemudi.
- Mengirim kabar kepada orang lain sebelum mulai berkendara.
- Minta bantuan penumpang jika ada hal penting yang harus diperiksa segera.
- Menepi ke tempat yang aman jika dalam keadaan mendesak harus menggunakan ponsel.
- Mengutamakan keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya.
- Menyadari dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

Jika sobat Justitia berkendara secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu, seperti memainkan ponsel, maka sobat Justitia bisa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 283 UU LLAJ dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,-.

Demikian Edukasi Hukum kali ini. Semoga sobat justitia dapat lebih bijak dalam penggunaan ponsel saat berkendara ya! **Simak [www.mediajustitia.com](http://www.mediajustitia.com).**



# PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

30 Oktober 2023

## Mengadakan Pembelajaran Inisiatif Guna Tingkatkan Kinerja Karyawan, PT PLN (Persero) Percayakan Justitia Training Center untuk Selenggarakan IHT Sistem Hukum Pembuktian

**MediaJustitia.com:** Justitia Training Center dipercayakan PT. PLN (Persero) laksanakan In House Training Sistem Hukum Pembuktian. Pelatihan ini dilakukan untuk mendukung transformasi PT. PLN (Persero) salah satunya dengan meningkatkan kinerja karyawan.

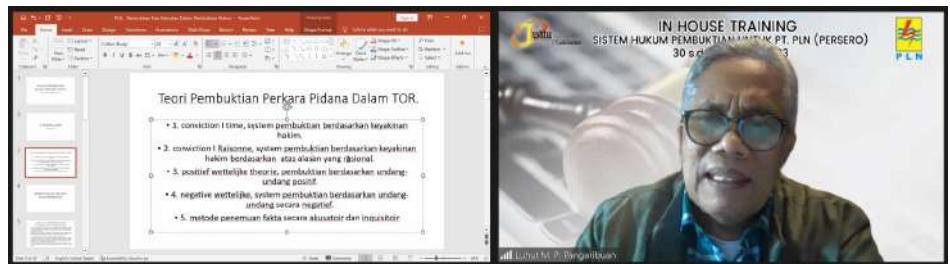
Pelatihan yang berlangsung melalui zoom meeting ini berlangsung selama 2 (dua) hari, pada 30 – 31 Oktober 2023. Diketahui peserta yang mengikuti pelatihan Sistem Hukum Pembuktian berjumlah 18 orang.

Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. dalam sambutannya menuturkan bahwa kerjasama Justitia Training dengan PT. PLN (Persero) bukanlah yang pertama kali, sebelumnya Justitia Training Center pernah memfasilitasi pelatihan bagi PT. PLN (Persero).

Andriansyah juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada Justitia Training center sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi terbesar saat ini.

**“Dalam hal ini PT. PLN (Persero) mempercayakan Justitia training center sebagai penyelenggara pelatihan dan sertifikasi hukum yang saat ini merupakan yang terbesar dan menghadirkan suatu pelatihan sistem hukum pembuktian di Indonesia yang telah disesuaikan dengan kebutuhan staff dan karyawan PT. PLN (Persero) sebagai peserta,”**

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med.  
Presiden Direktur Justitia Training Center



tidak henti kepada kami, kiranya segala usaha yang disusun PT. PLN (Persero) untuk karyawannya dan juga Justitia Training Center dapat memberikan manfaat kepada seluruh peserta yang mengikuti,” sambungnya.

Sejalan dengan itu, Mindar Purwantoro (Manajer UPDL Tuntungan PT. PLN (Persero) menuturkan rasa terima kasihnya atas kerjasamanya dengan Justitia Training Center.

**“Terima kasih Justitia training center sudah memfasilitasi team kami untuk belajar, hal ini merupakan program pembelajaran inisiatif strategic corporate yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja unit maupun corporate dalam jangka pendek maupun jangka Panjang,” jelasnya.**

Dalam kesempatan ini Justitia Training Center menghadirkan para narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya diantaranya Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H., LL.M.; Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.; Pahrur Roji Dalimunthe, S.H.; Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H.; V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.; Boris Tampubolon, S.H.

Mindar menyampaikan pelatihan ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan PT. PLN (Persero), untuknya diharapkan para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan maksimal.

“Semoga setelah dilakukan pembekalan ini, bisa menjadi bahan dalam proses (penambahan) kemampuan disisi pembuktian hukum baik pidana maupun perdata dalam proses peradilan sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan,” ujarnya.

“Semoga para peserta dapat mengikuti dengan baik dengan menyerap ilmunya dan menerapkannya untuk mendukung transformasi di PT. PLN (Persero) ini yang sedang gencar-gencarnya kita laksanakan,” tambahnya.

“Terimakasih kami sampaikan juga kepada PT. PLN (Persero) atas kepercayaan yang terus mengalir



*Selamat Hari*  
**PAHLAWAN  
NASIONAL**

10 NOVEMBER



Lahir di Surakarta, Hindia Belanda 10 Mei 1909, meninggal 25 November 1971 pada umur 62 tahun. Moeljatno adalah seorang jaksa dan dosen Indonesia. Beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 Januari 1957.

Foto: Wikipedia

Sampai dengan sekarang penjelasan Moeljatno atas KUHP digunakan oleh mahasiswa hukum dan para praktisi untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait KUHP.



# PROF. DR. MR. MOELJATNO

## PENDIDIKAN

- *Europese Lagere School* (SD)
- *Middelbaar Uitgebreid Lager Ondewijs* (SMP)
- *Algemene Middlebaar School* (SMA)
- *Rechts Hoge School* (sekolah tinggi hukum)

## PENDIDIKAN TINGGI

Setelah lulus kuliah di *Rechts Hoge School* (sekolah tinggi hukum), beliau pindah ke Yogyakarta dan bekerja untuk Kesultanan Yogyakarta.

1939 – 1942 beliau mendapatkan pekerjaan di Pengadilan Agama Tinggi. Moeljatno kembali ke Jakarta untuk bekerja di kantor jaksa setelah jepang menduduki Indonesia.

## MENJADI MENTERI

Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastro-

## KARIER

- Pengadilan Agama Tinggi Kantor Jaksa (Kensatukan Kooto Kensatu Kyoku)
- Pegawai tinggi di kantor Shihobu (Departemen Kehakiman)

## PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA

- Merumuskan UU No.1 Tahun 1946 bersama Menteri Kehakiman Soepomo dan beberapa staff Kementerian Kehakiman
- Jaksa Agung Muda di bawah Tirtawinata
- Menteri Kehakiman Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

amidjojo II. Ketika menjabat sebagai Menteri terdapat ketidaksepandangan antara Ia dengan Soeprapto terkait fungsi jaksa agung yang berada di bawah wewenang Kementerian Kehakiman yang membuat Moeljatno terdorong menetapkan perundangangan yang menempatkan Jaksa Agung berada di bawah wewenang Menteri Kehakiman.

## PUBLIKASI

1984 – Buku, **Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum (Open bare oder)**, diterbitkan oleh Bina Aksara Jakarta

1993 – Buku, **Asas asas hukum pidana**, diterbikan oleh Rineka Cipta Jakarta.

2001 – Buku, **KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, diterbitkan oleh Bumi Akasara Jakarta.

2007 – Buku, **KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, diterbitkan oleh Bumi Aksara Jakarta.

Munculnya perundangan tersebut, beliau ditentang oleh kepolisian dan kantor jaksa. Moeljatno kemudian mengundurkan diri pada 9 Januari 1957.

## SETELAH TIDAK MENJADI MENTERI

Moeljatno kembali menjadi dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dari tahun 1957 sampai 1958.

## Sobat Justitia

Halo Min Medjus! Saya mau cerita, saya kan punya adik angkat yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Sebut saja namanya Becca (nama disamarkan). Kita begitu akrab, dan selama ini saya selalu membantunya dan memberikan apa yang ia butuhkan. Sampai akhirnya ia jadi semena-mena. Suatu hari tiba-tiba ia menggunakan tanda tangan saya untuk keperluan pribadinya tanpa pemberitahuan dan persetujuan saya. Atas tindakannya saya merasa kesal dan dirugikan, sebelumnya mohon maaf tidak dapat saya sampaikan secara detail keperluan penggunaan tanda tangannya untuk apa, tapi yang ingin saya tanyalah adalah apakah bisa seseorang diberi sanksi hukuman dan penyelesaian hukum mana yang sebaiknya saya tempuh? Terima Kasih Min. ✓

## Mimin Medjus

Halo Sobat Justitia!

Terima Kasih atas pertanyaannya, dari pertanyaan Sobat Justitia dapat disimpulkan 2 (dua) garis besar pertanyaan. Pertama apakah perbuatan penggunaan tanda tangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat diberikan sanksi. Kedua bagaimana penyelesaian hukum atas permasalahan di atas. ✓

# TANDA TANGAN SAYA DIPALSUKAN ADIK ANGKAT, APA SAYA BISA TUNTUT DIA?



## TANDA TANGAN

Lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima).

Seiring perkembangan teknologi, dimungkinkan tanda tangan dilakukan secara elektronik. Pengertian Tanda Tangan Elektronik adalah persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut (Pasal 52 Ayat (2) PP 82/2012).

Dari pengertian tanda tangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan merupakan suatu bentuk persetujuan pemilik tanda tangan atas kuasanya untuk menghasilkan suatu peristiwa hukum. Ketika seseorang membubuhkan atau menempelkan tanda tangan dibawah surat atau berkas, artinya tulisan tersebut dianggap sebagai tulisan dari pemilik tanda tangannya yang berlaku di mata hukum.




Menjawab pertanyaan pertama Sobat Justitia, tindakan Becca yang menggunakan tanda tangan tanpa persetujuan dari pemilik tanda tangan merupakan perbuatan pemalsuan surat yang atas perbuatannya pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

Pada hakikatnya segala bentuk pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang bertentangan dengan hukum karena berdampak pada kerugian bagi individu maupun masyarakat dan memiliki konsekuensi hukuman pidana.

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

**Adami Chazawi**

Sumber: Blogger.com



Soesilo, menjelaskan bahwa yang dapat dikenai sanksi pidana dari pemalsuan surat adalah orang yang memalsukan surat-surat berikut. Surat yang dapat menerbitkan hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, atau surat andil. Surat yang dapat menerbitkan perjanjian, seperti surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan perjanjian lainnya. Surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kwitansi, cek, dan lainnya. Surat yang dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan atas suatu peristiwa, seperti surat tanda kelahiran, buku kas, dan lainnya. Menjawab pertanyaan kedua Sobat Justitia, terkait penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan surat, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pemalsuan tanda tangan diatur dalam

### Pasal 263 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya 6 (enam) tahun."

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan atau non litigasi. Sobat Justitia dapat melakukan penyelesaian diluar pengadilan dengan memintakan pertanggungjawaban dari Becca, karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai **ultimum remidium** yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.



Ilustrasi: Freepik.com

Namun apabila jalan pertama tidak diindahkan, Sobat Justitia dapat menempuh jalur litigasi dengan membawa alat bukti yang cukup yaitu surat atau berkas dengan tanda tangan yang dipalsukan. Apabila Becca terbukti dan memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP, maka ia dapat dipidana hingga enam tahun penjara.

Demikian jawaban kami, semoga menjawab Sobat Justitia, ya!

Baca Juga **#TANYAMEDJUS** lainnya di [www.mediajustitia.com/tanyamedjus](http://www.mediajustitia.com/tanyamedjus)



876

**VIRAL! VIDEO SYUR MIRIP ARTIS XX, SIAPA YANG LEBIH LAYAK DIPIDANA?**

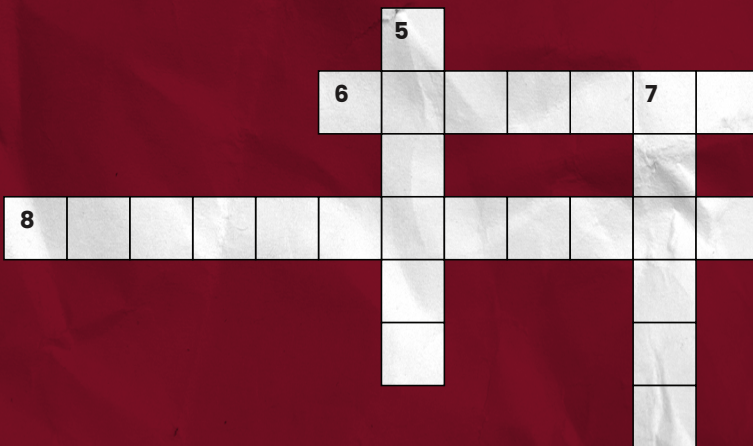


# TEKA-TEKI HUKUM

**BERHADIAH  
1.000.000 RUPIAH**  
\*UNTUK 10 ORANG PEMENANG\*

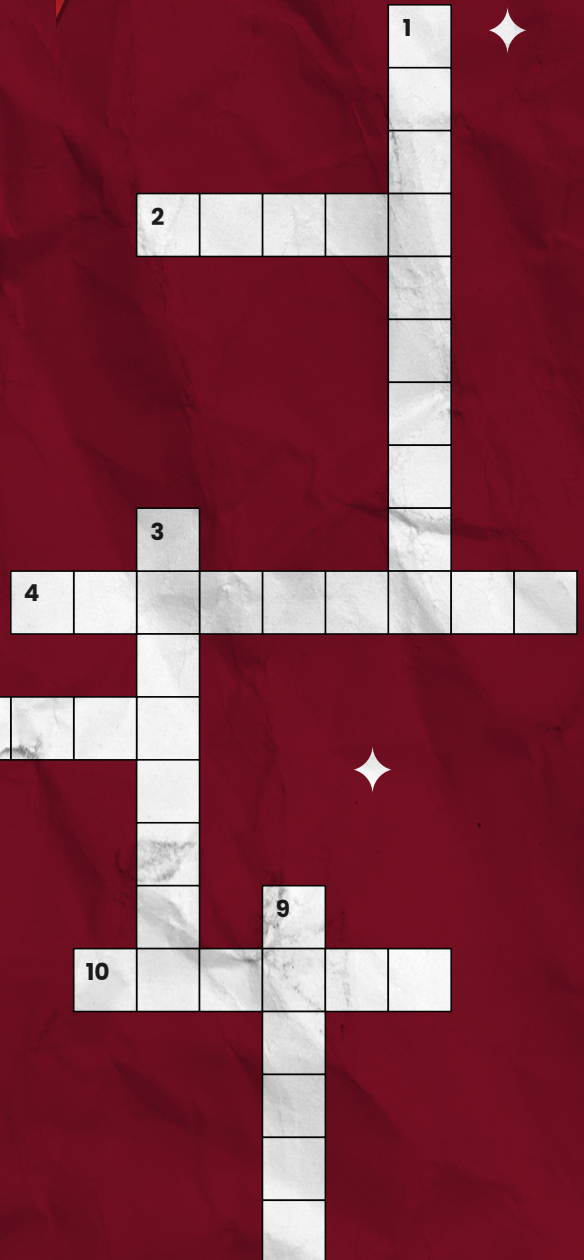
## Menurun

1. iures de iure
3. Di bawah pengampuan
5. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan disebut harta
7. Penggabungan atau peleburan dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama
9. Hak yang dimiliki suatu masyarakat adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya



## Mendatar

2. Delik kesengajaan
4. Norma dasar yang menjiwai suatu undang-undang (Hans Kelsen)
6. Saksi terdakwa yang bersedia bersaksi melawan saksi lain
8. Keadaan kahar
10. Sita/penyitaan



Kirimkan jawabanmu dengan cara scan barcode di atas ini

**10 PENJAWAB  
TERCEPAT DAN TEPAT  
AKAN MENDAPATKAN  
HADIAH!**

# PRODUCTION TEAM

**Della  
Savelya**

Head of  
Production



**Handoko  
Sigit**

IT Developer  
& Editor



**Arif  
Budiman**

Social Media  
Officer



**Alfira Dyah  
Kusuma W**

Graphic  
Designer



**Ikbal Yuda**

Copywriter



**Renaldo  
Herdiantoro**

Researcher



# CALL FOR ARTICLE BATCH XVIII

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XVIII" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. *Margin* (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum **20 November 2023** melalui email ke:



**medjustitia@gmail.com**

## Contact Us For More!



**Della Savelya**  
+62 811-1342-112



**Arif Budiman**  
+62 811-8201-492

# MEDIA JUSTITIA

VOL.12

## One Stop Legal Information



**Kantor Pusat Media Justitia**

Perkantoran Golden Centrum

Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

[www.mediajustitia.com](http://www.mediajustitia.com)